

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- b. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

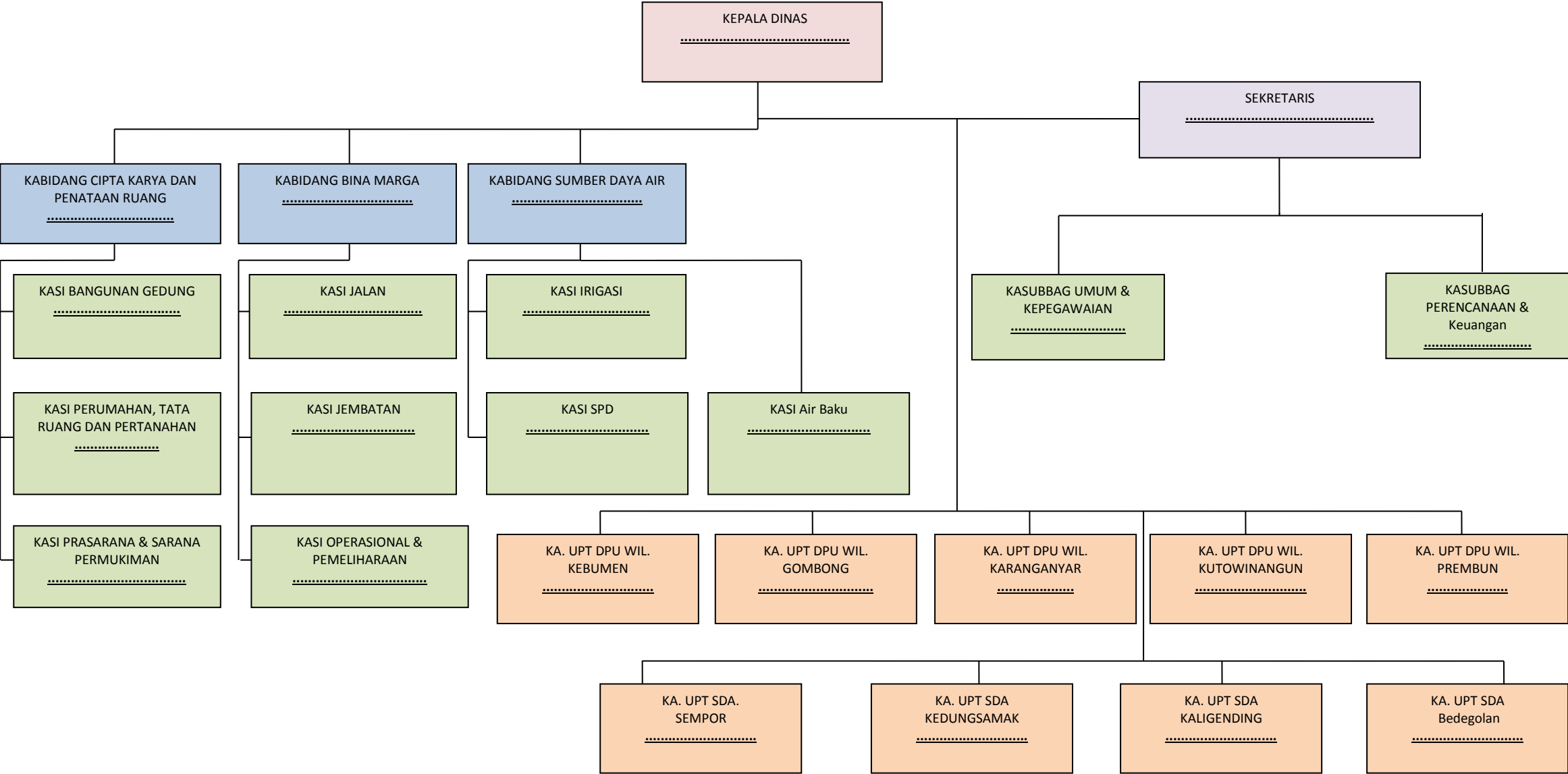
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan sebagai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri atas 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 2 Kepala Sub Bagian dan 9

Kepala Seksi, 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Jalan
 2. Seksi Jembatan; dan
 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, membawahi
 1. Seksi Bangunan Gedung.
 2. Seksi Perumahan, Tata Ruang dan Pertanahan; dan
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman.
- e. Bidang Sumber Daya Air
 1. Seksi Irigasi;
 2. Seksi Sungai, Pantai dan Drainase; dan
 3. Seksi Air Baku
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wilayah :
 1. UPTD Gombong
 2. UPTD Karanganyar
 3. UPTD Kebumen
 4. UPTD Kutowinangun
 5. UPTD Prembun.
 6. UPT SDA Sempor
 7. UPT SDA Kedungsamak
 8. UPT SDA Kaligending
 9. UPT SDA Bedegolan

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen



Adapun rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

Nama : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Pokok

Fungsi : 1) penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
2) perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
3) pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
4) pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
5) pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
6) pelaksanaan administrasi dinas bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
7) pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Nama : Seketaris

Jabatan

Tugas : melaksanakan perumusan rencana,
Pokok pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Fungsi : a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

- hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Nama : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,
 Jabatan
 Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan,
 Pokok pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Nama : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 Jabatan
 Tugas : melakukan penyiapan bahan
 Pokok perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas..

Nama : Bidang Bina Marga
 Jabatan
 Tugas : melaksanakan perumusan rencana,
 Pokok pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi jalan, jembatan, operasional dan pemeliharaan.
 Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jalan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jembatan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan operasional dan pemeliharaan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Nama : Seksi Jalan

Jabatan

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan
Pokok kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan, serta perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan.

Nama : Seksi Jembatan

Jabatan

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan
Pokok kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jembatan serta perencanaan pembangunan dan peningkatan jembatan.

Nama : Operasional dan Pemeliharaan

Jabatan

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan
Pokok kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan serta perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Nama : Bidang Sumber Daya Air

Jabatan

Tugas : melaksanakan perumusan rencana,
Pokok pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi irigasi, sungai dan pantai serta air baku.

Fungsi : 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan irigasi;
2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

sungai, pantai dan drainase;

- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan air baku; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Nama : Seksi Irigasi

Jabatan

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan
Pokok : kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.

Nama : Seksi Sungai, Pantai dan Drainase

Jabatan

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan
Pokok : kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai, pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.

Nama : Seksi Air Baku

Jabatan

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan
Pokok : kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan sumber-sumber air.

Nama : Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Jabatan

Tugas : Melaksanakan perumusan rencana,
Pokok : pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bangunan gedung, perumahan, tata ruang dan pertanahan, prasarana dan sarana permukiman.

Fungsi : 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bangunan gedung;

- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perumahan dan tata ruang dan urusan bidang pertanahan;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan prasarana dan sarana permukiman; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Nama : Seksi Bangunan Gedung

Jabatan

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan
 Pokok : kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta anggarannya, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan teknis bangunan gedung serta pelaksanaan administrasi teknik.

Nama : Seksi Perumahan, Tata Ruang dan Pertanahan

Jabatan

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan
 Pokok : kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan, pemanfaatan ruang, pembinaan dan penertiban pemanfaatan ruang serta mempertimbangkan penerbitan Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan serta izin membongkar, penyusunan regulasi kebijakan tentang pertanahan, fasilitasi dan pengadaan tanah Pemerintah Daerah, penanganan permasalahan tanah Pemerintah Daerah, koordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanahan, perubahan fungsi tanah Pemerintah Daerah, desa dan yayasan, penetapan lokasi pembangunan.

Nama : Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman

Jabatan

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan
 Pokok : kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perumusan

perencanaan dan penyuluhan, pembinaan teknis dan sosialisasi prasarana dan sarana permukiman, perbaikan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi serta pelaksanaan administrasi teknik.

Nama : Kepala Unit Pelaksana Teknis
Jabatan
Tugas : melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau
Pokok tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas

2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Aparatur pemerintah daerah dewasa ini dituntut untuk lebih profesional didalam menjalankan tugas, terutama dalam melayani masyarakat. Secara umum manajemen kepegawaian meliputi proses usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan SPK tenaga kontrak/honoror sebagaimana kebijakan pemerintah daerah.

Pembinaan dan mengembangkan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi. Pengembangan potensi ini meliputi pembinaan karier seperti usulan promosi, penyertaan PNS di dalam berbagai diklat, seperti Diklat Struktural, Diklat Teknis Fungsional, dan Diklat-diklat keahlian lainnya. Termasuk didalamnya dukungan penuh terhadap PNS yang melanjutkan studi melalui ikatan dinas maupun proses ijin belajar.

Terkait dengan disiplin pegawai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berusaha untuk menegakkan disiplin melalui pengawasan konsistensi PNS terhadap ketentuan jam kerja dan kinerja PNS melalui upaya peringatan dan pembinaan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 273 orang, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Data 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Sampai dengan Akhir Tahun 2017

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	%
1.	Strata 2 (S-2) Magister	7	2,66
2.	Strata 1 (S-1) Sarjana	27	10,27
3.	Diploma 3	8	3,04
4.	S M U	164	62,36
5.	S M P	36	13,69
6.	S D	21	7,98
	J U M L A H	263	100

Data 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Sampai dengan Akhir Tahun 2017

NO	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	II b	1
2.	III a	1
3.	III b	3
4.	IV a	19
	Jumlah	24

Data 2.3
Pendistribusian pegawai di kantor dinas
Sampai dengan Akhir Tahun 2017

NO	RINCIAN	PNS	PHL
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretariat		
	a. Sekretaris	1	
	b. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	-	
	c. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1	
	d. Jabatan Fungsional Umum Sekretariat	31	
3.	Bidang Bina Marga		
	a. Kepala Bidang	1	
	b. Kepala Seksi Jalan	1	
	c. Kepala Seksi Jembatan	1	
	d. Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan	1	
	e. Jabatan Fungsional Umum Bidang Bina Marga	27	
4.	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang		
	a. Kepala Bidang	-	
	b. Kepala Seksi Bangunan Gedung	1	
	c. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman	1	
	d. Kepala Seksi Perumahan, Tata Ruang dan Pertanahan	1	
	e. Jabatan Fungsional Umum Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	8	
5.	Bidang Sumber Daya Air		
	a. Kepala Bidang	1	
	b. Kepala Seksi Irigasi	1	
	c. Kepala Seksi Sungai, Pantai dan Drainase	1	
	d. Kepala Seksi Air Baku	1	
	e. Jabatan Fungsional Umum Bidang Sumber Daya Air	15	
7.	UPTD Wilayah		
	Kepala UPTD Gombong	1	
	Jabatan Fungsional Umum	15	
	Kepala UPTD Karanganyar	1	
	Jabatan Fungsional Umum	15	
	Kepala UPTD Kebumen	1	
	Jabatan Fungsional Umum	10	
	Kepala UPTD Kutowinangun	1	
	Jabatan Fungsional Umum	7	
	Kepala UPTD Prembun	1	
	Jabatan Fungsional Umum	4	
	Kepala UPTD SDA Sempor	1	
	Jabatan Fungsional Umum	34	
	Kepala UPTD SDA Kedungsamak	1	
	Jabatan Fungsional Umum	26	

NO	RINCIAN	PNS	PHL
	Kepala UPTD SDA Kaligending	1	
	Jabatan Fungsional Umum	23	
	Kepala UPTD SDA Bedegolan	1	
	Jabatan Fungsional Umum	24	
	JUMLAH	263	

Data 2.4
Jumlah pegawai berdasarkan golongan
Sampai dengan Akhir Tahun 2017

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	IV	5
2.	III	63
3.	II	174
4.	I	21
	Jumlah	263

Data 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan
Sampai dengan Akhir Tahun 2017

NO	KEPANGKATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Utama Muda	-
2.	Pembina Tk.I	1
3.	Pembina	4
4.	Penata Tk. I	7
5.	Penata	10
6.	Penata Muda Tk.I	28
7.	Penata Muda	18
8.	Pengatur Tk.I	9
9.	Pengatur	96
10.	Pengatur Muda Tk. I	35
11.	Pengatur Muda	34
12.	Juru Tk. I (I/d)	2
13.	Juru (I/c)	15
14.	Juru Muda Tk. I (I/b)	4
15.	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	263

Berdasarkan data kepegawaian di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan SMU/SMK masih mendominasi personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebesar 62,36%,

jenjang pendidikan SD sebesar 7,98%, jenjang pendidikan SLTP sebesar 13,69%, sementara jenjang pendidikan kesarjanaaan (S1/D3) masih jauh dari yang diharapkan dengan tingkat prosentase S2 sebesar 2,66%, S1 sebesar 10,27% dan D3 sebesar 3,04%. Terlihat bahwa rendahnya tingkat jenjang pendidikan SDM yang dimiliki DPUPR Kabupaten Kebumen memberi kontribusi cukup tinggi pada tingkat kinerja OPD. Kondisi ini mendesak untuk segera ditangani dengan memberikan ruang belajar yang seluas luasnya kepada personil DPUPR Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan jenjang pendidikan baik dengan ijin belajar maupun tugas belajar.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

Data 2.6
Sarana tempat/ ruangan di kantor dinas
Sampai dengan Akhir Tahun 2017

NO	RINCIAN	JUMLAH RUANG
1.	Ruang Kepala dinas	1
2.	Ruang Sekretariat	1
3.	Ruang Bidang	3
4.	Ruang Pertemuan	2
6.	Gudang	2
7.	Musholla	1
8.	Workshop	1
9.	Rumah dinas	1
10.	Tempat parkir kendaraan	2
	Jumlah	14

Data 2.7
Sarana Angkutan dinas
Sampai dengan Akhir Tahun 2017

NO	RINCIAN	JUMLAH
1.	Staion Wagon	5
2.	Pick Up	15
3.	Trailer	1
4.	Kend.Berm.Angk.Brang Lain	8
5.	Kend.Berm.Khusus Lain	2
6.	Sepeda Motor	89
	Jumlah	120

Data 2.8
Peralatan dan Mesin Sarana Kerja
Sampai dengan Akhir Tahun 2017

NO	RINCIAN	JUMLAH BARANG
1.	Komputer PC	41
2.	Laptop	37
3.	Note Book	2
4.	Printer	20
5.	LCD proyektor	8
6.	Kamera	42
7.	Handycam	2
8.	Mesin Ketik	23
9.	Papan tulis	13
10.	Kipas angin	23
11.	Faximile	1
12.	Alat Hitung	15
13.	AC	37
	Jumlah	264

Data 2.9
Meja kursi lemari dan Mebelair
Sampai dengan Akhir Tahun 2017

NO	RINCIAN	JUMLAH
1.	Almari	69
2.	Meja kerja	284
3.	Filling kabinet	13
4.	Kursi tunggu	27
5.	Kursi rapat	164
6.	Meja Eselon III	5
7.	Meja Eselon IV	18
8.	Meja komputer	19
9.	Kursi eselon III	5
10.	Kursi Eselon IV	18
11.	Kursi Kerja	284
12.	Brankas	5
13.	Rak	32
14.	Meja eselon II	1
15.	Meja rapat	50
16.	Meja kursi tamu	19
	Jumlah	1003

Data 2.10
Jaringan dan Sistem Informasi
Sampai dengan Akhir Tahun 2017

NO	RINCIAN	JUMLAH
1.	Jaringan Telepon	13
2.	Jaringan Listrik	1
3.	Jaringan internet	1
4.	Sistem Informasi	1
	Jumlah	16

Data 2.11
Alat Berat Dan Perbengkelan
Sampai dengan Akhir Tahun 2017

NO	RINCIAN	JUMLAH
1.	Buldozer	1
2.	Excavator	4
3.	Concrete Vibrator	2
4.	Truck Loader + Attachment	1
5.	Wheel Loader + Attachment	3
6.	Mesin Potong Rumput	12
7.	Pompa Air	6
8.	Mesin Bor	1
9.	Trafo Stater	1
10.	Mesin Proses Lain-Lain	26
	Jumlah	57

Berdasarkan data sarana dan prasarana di atas, nampak bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cukup memiliki peralatan kerja yang dibutuhkan namun demikian banyaknya peralatan kerja yang dimiliki membutuhkan biaya perawatan/ pemeliharaan yang cukup besar. Kondisi ini mendorong dilakukan efisiensi pemeliharaan peralatan kerja dan efektifitas penggunaan peralatan.

Ketersediaan peralatan berat diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Adapun data pendapatan dari sewa peralatan dari tahun ke tahun selalu meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan OPD. Pendapatan sewa alat tahun 2016 mencapai Rp. 603.775.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp. 155.112.100 atau sebesar 34,57% dari tahun 2015 Rp. 448.662.900. Adapun data lengkap pendapatan sewa alat, kami sajikan dalam tabel sebagai berikut;

Data 2.12
Pendapatan sewa alat berat
Tahun 2015

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
	Pendapatan sewa alat berat	331.725.000	420.454.000	448.662.900	603.775.000

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk

urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen meliputi;

2.3.1. Jalan

Secara geografis Kabupaten Kebumen memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di jalur selatan Provinsi Jawa Tengah. Jalur selatan tersebut menghubungkan antara Bandung-Yogyakarta yang melewati Kabupaten Kebumen. Posisi yang sangat strategis tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Kebumen, oleh karena itu dukungan sarana dan prasarana jalan yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan transportasi perlu mendapatkan perhatian serius.

Jalur selatan yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen merupakan jalan nasional dan provinsi dengan panjang jalan nasional 54,19 km dan jalan provinsi sepanjang 30,09 km sedangkan panjang jalan kabupaten yang menghubungkan pusat ibukota Kabupaten Kebumen dengan seluruh wilayah kecamatan sepanjang 975,15 km. Dari 975,15 km panjang jalan kabupaten, sebanyak 448,64 km (46,01%) dengan kondisi baik, 199,61 km (20,470%) kondisi sedang, 150,21 km (15,40%) kondisi rusak ringan dan 176,69 km (18,12%) kondisi rusak berat dengan permukaan jalan berupa aspal, dan sebagian berupa batu kerikil. Gambaran secara rinci perkembangan jalan kabupaten berdasarkan kondisi jalan dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.1.
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Jalan
Kabupaten Kebumen
Tahun 2013-2017

No	Kondisi Jalan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
a	Baik	Km	473,03	495,69	448,64	590,56	508,64
b	Sedang	Km	132,92	138,50	199,61	89,72	177,45
c	Rusak ringan	Km	182,63	157,69	150,21	126,57	121,17
d	Rusak Berat	Km	169,50	166,20	176,69	168,30	153,09
	Jumlah	Km	958,08	958,08	975,15	975,15	960,35

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat pengurangan ruas jalan kabupaten sepanjang 14,8 km sehingga total panjang jalan kabupaten mencapai 960,35 km . Selama tahun 2017 ada beberapa ruas jalan yang berubah status dari jalan desa menjadi jalan kabupaten dan dari jalan kabupaten menjadi jalan desa.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kondisi jalan belum terwujud secara optimal. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani dengan baik akan menimbulkan dampak negatif yaitu meningkatnya angka kecelakaan pengguna jalan serta berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Kabupaten Kebumen. Hal ini mengingat sarana dan prasarana jalan yang baik dapat menunjang pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kebumen serta dapat membuka akses dalam kegiatan sekor perdagangan maupun transportasi.

Pada ruas-ruas jalan arteri khususnya di Kota Kebumen yang berfungsi menghubungkan kota atau jalur regional namun saat ini juga berfungsi sebagai jalur internal kota. Himpitan fungsi yang demikian sedikit banyak menyebabkan jalan-jalan tersebut dipadati oleh pergerakan regional maupun lokal, pada akhirnya kecepatan menjadi rendah. Sedangkan untuk menghubungkan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat dan Yogyakarta merupakan jalan Nasional dengan kondisi cukup baik.

Jalan Nasional yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen sepanjang 62,89 km, terdiri atas Ruas Jalan Banyumas-Kebumen 23,98 km, Jalan Lingkar Selatan Kebumen 9,11 km dan Batas Kota Kebumen-Prembun 17,05 km, Jalan dan Ruas Jalan Prembun-Kutoarjo 12,75 km. Sedangkan Jalan Provinsi terdiri atas Ruas Jalan Prembun-Wadaslintang 15,64 km dan Ruas Jalan Gombong-Sempor-Ketileng sepanjang 14,03 km. Total panjang Jalan Provinsi yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen 29,67 km.

Untuk jalan non status, dengan total panjang 60,00 km terdiri atas Ruas Jalan Wawar-Buluspesantren 18,60 km, Ruas Jalan

Buluspesantren-Karangbolong 24,40 km dan Ruas Jalan Karangbolong-Bodo sepanjang 17,00 km

Pada ruas-ruas Jalan Lingkar Utara (JJLU) terdapat 11 ruas jalan dengan total panjang 67,1 km. Masing-masing ruas tersebut yaitu Ruas Jalan Kenteng-Ketileng sepanjang 14,2 km, Ruas Jalan Sedayu-Lawangawu sepanjang 2,35 km, Ruas Jalan Pagebangan-Somagede sepanjang 8,8 km, Ruas Jalan Wonotirto-Gunungsari sepanjang 6,7 km, Ruas Jalan Kebakalan-Giritirto sepanjang 2,15 km, Ruas Jalan Karangsambung-Sadangwetan sepanjang 9,3 km, Ruas Jalan Krakal-Sadangkulon sepanjang 7,9 km, Ruas Jalan Wadasmalang-Slepi sepanjang 5,0 km, Ruas Jalan Krakal-Pujotirto sepanjang 4,0 km, Ruas Jalan Pujotirto-Manisan sepanjang 3,2 km dan Ruas Jalan Sawangan-Padureso sepanjang 3,5 km.

Gambaran tentang kondisi dan panjang jalan nasional, provinsi dan kabupaten disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.2
Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan
Tahun 2013-2017

No	Kewenangan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nasional	Km	54,19	54,19	54,19	62,89	62,89
2	Propinsi	Km	30,09	30,09	30,09	29,67	29,67
3	Kabupaten	Km	958,08	958,08	975,15	975,15	960,35
4	Jalan desa	Km	1.254,01	1.254,01	1.254,01	1.254,01	1.520,90
5	Nonstatus	Km	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

2.3.2. Jembatan

Jembatan merupakan sarana dan prasarana penting dalam menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Sebagai sarana penghubung, jembatan merupakan infrastruktur vital masyarakat dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen selama 2017 telah membangun dan memelihara jembatan antara lain Jembatan Muntuk Dawung Pada Ruas Jalan Rowokele Banyumudal, Jembatan Jembatan pengempon dan Jembatan

Losari Pada Ruas Jalan Pagebangan, Jembatan Jembatan Pada Ruas Jalan Bonosari Kedungwringin, Jembatan Jembatan Korowelang Pada Ruas Jalan Gumenter Kabuaran, Jembatan Jembatan Cacaban Pada Ruas Jalan Kebakalan Giritirto dan Jembatan Jembatan Caruban Pada Ruas Jalan Kemujan-Karangsari, dan Jembatan Pekutan Pada Ruas Jalan Ngabean-Pekutan yang menghubungkan antar kawasan. Jumlah seluruh jembatan yang sudah dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sampai Desember 2017 sebanyak 719 unit meliputi jembatan besar dan kecil.

Namun demikian masih terdapat wilayah yang membutuhkan bangunan jembatan sebagai sarana transportasi terutama wilayah utara Kabupaten Kebumen agar mobilisasi masyarakat lebih mudah dalam menjangkau sumber-sumber ekonomi. Kondisi yang ada, wilayah utara Kebumen belum sepenuhnya bisa dihubungkan dari timur ke barat yang antara lain disebabkan masih terbatasnya bangunan jembatan sehingga masyarakat masih menempuh jalur panjang memutar untuk mobilisasi.

Ke depan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merencanakan akan membangun jembatan penghubung antar wilayah yang antara lain Jembatan Kaligending membelah Sungai Lokulo menghubungkan Kecamatan Karangsambung dan Karanggayam, Jembatan Sarwogadung membelah Sungai Gentan, dan Jembatan Sangubanyu Buluspesantren.

2.3.3. Drainase Permukiman

Panjang drainase sekunder di Kabupaten Kebumen untuk jenis drainase sekunder tertutup maupun drainase sekunder terbuka tidak menunjukkan peningkatan, mengingat terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan drainase. Selama tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah membangun dan memelihara drainase di sepanjang ruas jalan kabupaten, antara lain drainase Jalan Raya Soka Pejagoan, drainase Lingkungan Kecamatan Poncowarno, Drainase Lingkungan Kecamatan Ayah, drainase lingkungan Kecamatan Karanganyar dan lain lain drainase lingkungan permukiman.

2.3.4. Daerah Irigasi

Daerah Irigasi (DI) merupakan sarana dan prasarana penting yang menunjang kebutuhan air untuk pertanian. Terdapat 283 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dimana 172 DI merupakan DI lama dan 111 DI baru menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2016.

2.3.5. Air Bersih dan Air Limbah

Persentase Proporsi rumah tangga dengan akses sarana air minum di perkotaan maupun perdesaan meningkat dari tahun ke tahun. Sistem air minum aman untuk masyarakat berupa air minum perpipaan untuk 26 kecamatan telah mencapai 1.070.846 jiwa penerima manfaat. Kegiatan air minum dikelola melalui program APBN, Pamsimas, AMPL, DAK, HID maupun Banprov dan APBD.

Jumlah masyarakat penerima manfaat air bersih (per jiwa) dari tahun ke tahun terus memperlihatkan peningkatan cukup signifikan. Sampai tahun 2010 jumlah masyarakat penerima manfaat air bersih sebanyak 170.689 jiwa. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan penambahan program pembangunan dan pemeliharaan instalasi air bersih menjadi 1.070.846 jiwa pada tahun 2017. Namun demikian, dengan banyaknya desa di Kabupaten Kebumen yang termasuk desa rawan air bersih, sehingga masih diperlukan tambahan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan air bersih. Sumber pembiayaan air bersih masih bergantung sumber pembiayaan pusat (DAK), kontribusi APBD masih sangat terbatas. Harapannya ke depan, alokasi pendanaan untuk air bersih bisa ditingkatkan, agar target pencapaian air bersih 100% pada tahun 2019 bisa tercapai.

Sementara itu sistem air limbah di Kabupaten Kebumen hingga saat ini masih ditangani secara individu oleh tiap-tiap rumah tangga dan masing-masing industri (Industri rumah tangga). Air limbah rumah tangga langsung dibuang ke saluran pembuangan/selokan. Untuk industri, sebagian kecil memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), air sebelum dibuang ke perairan umum diolah di dalam unit ini terlebih dahulu.

Sarana air limbah rumah tangga baik berupa IPAL maupun IPLT secara kualitas maupun kuantitas masih terbatas. Kondisi ini banyak disebabkan kesulitan mencari lokasi IPAL untuk kawasan. Salah satu IPAL kawasan yang sudah terbangun adalah IPAL kawasan Kutosari sementara untuk IPLT selama periode tahun 2013-2017 sebanyak 1 unit, yaitu IPLT Kaligending. Sementara untuk pembangunan tangki septik komunal sudah cukup tersedia.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen meliputi :

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pemanfaatan peralatan dan laboratorium
2. Penataan Tata ruang wilayah, Mengembangkan pemanfaatan air bersih, dan meningkatkan pengelolaan drainase, air limbah dan sampah, secara optimal serta berkelanjutan
3. Pengembangan permukiman dan perumahan, meningkatkan pemanfaatan lahan, pengaturan tata bangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran secara optimal
4. Pengembangan manajemen dan meningkatkan SDM yang kompeten serta pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Sejalan dengan Program Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang pencairan tahun infrastruktur 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan berusaha meningkatkan kondisi jalan kabupaten guna mencapai kondisi jalan mantap. Pembukaan jalan baru lingkaran utara Kebumen dari Sempor sampai Padureso menjadi prioritas pembangunan jalan dan membuka akses masyarakat ke pusat pelayanan. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dari tahun ke tahun selalu meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas beserta penganggarnya.

Sebagai daerah yang sebagian berupa dataran tinggi (pegunungan), sebagian wilayah Kabupaten Kebumen mengalami krisis air bersih (kekeringan) terutama di musim kemarau. Upaya untuk mengatasi dampak kekeringan sudah dilakukan melalui program bantuan provinsi untuk air bersih (SPAM), program Pamsimas dan DAK Air Bersih.

Dari sisi tata ruang, beberapa aspek dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kebumen (RTRW) mempengaruhi beberapa

kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terutama dalam hal pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta infrastruktur lainnya

Selain perbandingan hasil yang dicapai antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pekerjaan Umum RI, hasil telaah tata ruang menjadi bagian dari analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

Dari berbagai analisis kajian di atas maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayanan OPD, sebagai berikut;

- a. Bentang geografis wilayah Kabupaten Kebumen yang luas menjadi tantangan pemerataan pembangunan di sektor pekerjaan umum.
- b. Peraturan/kebijakan pemerintah pusat yang belum banyak dipedomani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Percepatan infrastruktur daerah seiring dengan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Jawa Tengah yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen.
- d. Kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang sebagian berupa dataran tinggi (pegunungan) berpotensi tinggi terjadi krisis air bersih (kekeringan).
- e. Perkembangan dan perluasan kota seiring dengan pertambahan laju pertumbuhan penduduk, maka bertambah pula produksi sampah yang berpotensi menjadi persoalan yang mendesak untuk diatasi.
- f. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

- g. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi.
- h. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multitafsir.
- i. Terbukanya pasar tenaga kerja global yang dapat mempengaruhi tenaga trampil dan tenaga ahli konstruksi dalam negeri.
- j. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif.

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang dimiliki dan kemungkinan bisa dioptimalkan dan dikembangkan dalam pelayanan OPD, sebagai berikut;

- a. Banyaknya potensi wilayah yang dapat dikembangkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas infrastruktur yang dapat mendukung sektor ekonomi sosial dan budaya menuju kesejahteraan masyarakat.
- b. Banyaknya proyek pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran.
- c. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga pemerinrah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kebumen semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur sebagai wujud dari partisipasi publik.
- d. Program-program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pekerjaan Umum yang bisa diakses untuk membantu menunjang pelaksanaan program-program Pemerintah Kabupaten Kebumen
- e. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
- f. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- g. Kondisi stabilitas keamanan, ketertiban dan politik yang kondusif di Kabupaten Kebumen, sehingga memperbesar kemungkinan

kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lain, Swasta, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.

- h. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang didalam penyusunan produk – produk perencanaan
- i. Terbukanya pasar tenaga kerja jasa konstruksi ke luar negeri

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan yang kurang mempedomani dokumen perencanaan secara menyeluruh dalam penyusunan rencana kerja sehingga target kinerja yang ditetapkan pada awal periode renstra yang lalu tidak seluruhnya terakomodasi pada dokumen pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
- b. Keterbatasan personil pada seluruh bidang yang secara teknis menangani kegiatan.
- c. Faktor geografi, wilayah Kebumen terbagi dalam wilayah pegunungan yang dilewati sungai besar, yang mempersulit mobilisasi masyarakat.

Meski demikian, beberapa indikator menunjukkan kemajuan yang berarti. Penampilan fisik gedung-gedung perkantoran pemerintah sudah nampak bagus. Prosentase kondisi jalan baik pun menunjukkan kenaikan cukup signifikan baik jalan kabupaten maupun jalan desa dengan penambahan jumlah ruas maupun panjang jalan kabupaten.